

ANTI-AGGRESSIVE ACCOUNTING CREATIVE PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA MENUJU PEMBANGUNAN INKLUSIF BERKELANJUTAN

I Nyoman Darmayasa^{*1}, I Ketut Suwintana², Ni Nyoman Harini Puspita³, I Made Agus Putrayasa⁴, I Ketut Parnata⁵, I Made Bagiada⁶, Ni Luh Putri Setyastrini⁷, Ketut Nurhayanti⁸, Putu Adi Suprpto⁹, Ni Komang Urip Krisna Dewi¹⁰

¹⁻¹⁰Politeknik Negeri Bali, Jl. Raya Kampus Bukit Jimbaran Kuta Selatan, Indonesia

*Korespondensi: nyomandarmayasa@pnb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna praktik *aggressive accounting creative* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penelitian ini melibatkan empat partisipan dari dinas dan lembaga pemberdayaan LPD, akademisi, dan tiga ketua LPD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilanjutkan dengan triangulasi data (sumber, teknik, dan waktu) mengacu pada analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis data menggunakan analisis interpretif. Penelitian ini menemukan adanya praktik *aggressive accounting creative* yang bermakna mempertahankan kepercayaan *stakeholders* sehingga tingkat kesehatan dan risiko LPD tetap terjaga. Pemaknaan baru *anti-aggressive accounting creative* melalui transformasi digital pelaporan berupa pengakuan pendapatan akrual dan kas *adjustment*. Transformasi digital digambarkan melalui teori *technology acceptance model* (TAM), tanggungjawab pengelolaan bisa dijelaskan dengan teori *stakeholders* dan teori keagenan dengan asumsi tambahan *intentional human beings extending human local values*. Kontribusi penelitian secara teoritis berupa pengembangan asumsi teori dan secara praktis untuk mencegah *aggressive accounting creative* sehingga pembangunan inklusif berkelanjutan dari desa menuju Indonesia bisa terwujud.

Kata kunci: *accounting creative*, lembaga perkreditan desa, pembangunan inklusi berkelanjutan, teori keagenan, transformasi digital

Abstract

This study aims to understand the meaning of *aggressive accounting creative practices* in Village Credit Institutions (LPD). This study involved four participants from LPD empowerment services and institutions, academics, and three LPD heads. Data were collected through in-depth interviews, followed by data triangulation (source, technique, and time) based on Miles and Huberman's interactive analysis. Interpretive analysis was used for data analysis. This study found the existence of *aggressive creative accounting practices*, which means maintaining stakeholder trust so that the level of health and risk of LPDs is maintained. New meaning of *anti-aggressive creative accounting* through digital transformation of reporting in the form of accrual income recognition and cash adjustments. Digital transformation is described through the *technology acceptance model* (TAM) theory, which can be explained using stakeholder theory and agency theory with the additional assumption of *intentional human beings extending human local values*. The research contribution is theoretically in the form of developing theoretical assumptions and practically to prevent *aggressive accounting creativity* so that sustainable inclusive development from villages towards Indonesia can be realized.

Keywords: *creative accounting*, village credit institutions, sustainable inclusive development, agency theory, digital transformation

PENDAHULUAN

Secara empiris, *accounting creative* dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan melalui pelaporan keuangan yang informatif (Vega Falcón *et al.*, 2021). Lebih lanjut praktik *accounting creative* melalui intervensi sangat memengaruhi nilai perusahaan meskipun pada nantinya praktik ini bisa terdeteksi oleh pakar auditor (Adámiková and Čorejová, 2021). Praktik *accounting creative* yang agresif dengan memanfaatkan celah ketentuan bisa mengarah pada tindakan kriminal dan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Gupta and Kumar, 2020). Praktik *accounting creative* juga mengurangi transparansi dan kualitas laporan keuangan (Abed, Hussin, Ali, *et al.*, 2022; Abed, Hussin, Haddad, *et al.*, 2022).

Teori perilaku organisasi yang mendasari intensi penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah teori keagenan. Teori keagenan awalnya dikenalkan oleh Jensen dan Meckling yang menggambarkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dengan pengelola. Teori ini berkembang seiring dengan perkembangan bisnis dan organisasi korporasi (Davis *et al.*, 2021; Onjewu, Walton and Koliouis, 2023). Benturan kepentingan bergeser menuju pada kepentingan prinsipal mayoritas dengan prinsipal minoritas, selanjutnya kepentingan prinsipal mayoritas dan minoritas dengan kreditur, otoritas pajak, atau pihak ketiga (Ali, 2020; Alkausar *et al.*, 2023). Belakangan benturan kepentingan berpotensi mengarah antara komunitas sebagai *stakeholders* suatu entitas dengan lembaga pemberdayaannya (Darmayasa, 2023, 2024).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengacu pada UU Lembaga Keuangan Mikro tunduk pada hukum adat mengingat stakeholdersnya adalah masyarakat adat, sehingga LPD memiliki kekhususan. LPD tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas pajak (Darmayasa, 2023; Darmayasa, Parnata and Setyastrini, 2023). Karakter khusus LPD tersebut jika dikaitkan dengan teori keagenan, benturan kepentingan yang terjadi bukan antara pengelola dengan pihak ketiga dalam hal ini kreditur atau otoritas pajak (Darmayasa, 2023). Mencermati kepemilikan LPD oleh desa adat maka potensi benturan kepentingan muncul antara kesepakatan kepentingan pengelola dan komunitas desa adat dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberdayakan LPD. Dalam konteks LPD, mengacu pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pemberdayaan LPD diemban oleh Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA). Saat ini terdapat 600 LPD dari 1.439 LPD yang sudah bertransformasi pelayanan dan pelaporan keuangan berbasis digital. Pengamatan peneliti pada kegiatan pendampingan tranformasi digital sepanjang tahun 2023 terdapat fenomena resistensi dari para ketua LPD untuk menggunakan aplikasi dalam pelayanan dan pelaporan keuangan (Darmayasa, 2024). Resistensi transformasi digital pada LPD terkait adanya praktik *accounting creative* untuk menjaga tingkat kesehatan dan risiko LPD yang dapat diterima oleh masyarakat.

Secara filosofis tanggungjawab LPD tidak terbatas pada komunitas desa adat meskipun LPD tunduk pada hukum adat, LPD wajib bertanggungjawab kepada seluruh *stakeholders* LPD. *Stakeholders* LPD meliputi seluruh nasabah, masyarakat adat, dan pemerintah. Pertanggungjawaban LPD terhadap seluruh *stakeholders* bisa digambarkan melalui teori *stakeholders* (Mahajan *et al.*, 2023). Secara empiris pembangunan wilayah di Indonesia sangat tergantung dengan pengeluaran di wilayah sekitarnya (Solihin *et al.*, 2021). Pemerintah diharapkan mendorong tumbuhnya *public enterprises* mengingat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (Lin, 2022). Kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian hukum juga membantu tumbuhnya investasi sebagai salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi (Andersson, Juliá and Palacio Chaverra, 2024). Demikian juga dengan pembangunan di kabupaten dan kota di Provinsi Bali, ditopang oleh 1.439 LPD yang tersebar pada desa adat di Provinsi Bali (Sarmawa *et al.*, 2020; Riana, 2021), hal ini menjadi penggerak ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Perkembangan penelitian terkait LPD saat ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan LPD yang berbasis nilai lokalitas *Tri Hita Karana* (Dewi, 2021; Nugraha and Suryanawa, 2021). Dari perspektif terjadinya *fraud* pada LPD, para peneliti lebih melihat adanya determinan lemahnya pengawasan dan sumber daya pengawas LPD (Suputra, 2021; Putri and Suartana, 2022). Hasil *focus group discussion* (FGD) dengan LP LPD dan DPMA pada 7 Desember 2023 mengantarkan pada fenomena praktik *accounting creative* yang membutuhkan solusi kongkrit dan praktis mengingat LPD adalah intermediasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan. Mencermati *research gap* antara penelitian sebelumnya dengan hasil FGD, penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik *aggressive accounting creative* dan memunculkan makna baru berupa solusi terapan anti-*aggressive accounting creative*. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan asumsi teori keagenan, teori *stakeholders*, dan teori *technology acceptance model* (TAM). Manfaat penelitian terapan berupa pemahaman solusi aplikatif anti-*aggressive accounting creative* sehingga pembangunan inklusif yang berkelanjutan dari desa, menuju wilayah, dan menuju Indonesia bisa terwujud.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam *natural setting*, mengingat kriteria utama penelitian sosial yang dilakukan dalam suatu komunitas sosial masyarakat yang kental dengan *local wisdom values* mengisyaratkan suasana alamiah (Gioia, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui wawancara semi terstruktur dan observasi untuk memperoleh makna dari aktivitas sosial pengelolaan LPD dan pengawasan beserta pemberdayaan LPD. Peneliti merupakan instrumen kunci penelitian yang memberikan makna baru dari pandangan partisipan (Anderson and Holloway, 2020), sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami dan memperoleh makna baru praktik *aggressive accounting creative* pada LPD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengadopsi pola *interactive analysis* dengan tahapan: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) verifikasi atau tahap simpulan, dan bisa kembali kepada tahap awal dengan mengumpulkan data sampai mencapai data jenuh (Miles, Huberman and Saldana, 2019). Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder sebagai pendukung beserta penguat data wawancara. Data primer digali sepanjang proses penelitian Dana Padanan tahun 2023 ketika melakukan aktivitas transfer teknologi pada LPD. Proses penggalian data dilakukan dalam suasana kekeluargaan yang dibalut dengan kepedulian untuk memajukan LPD. Proses penggalian data tidak menggunakan panduan secara formal, mengalir dan dilakukan setiap ada kesempatan sepanjang tahapan penelitian. Data sekunder diperoleh dari LP LPD berupa data tingkat kesehatan LPD, panduan dan ketentuan LP LPD, beserta kebijakan pemberdayaan LPD. Penguatan data primer dan sekunder dilakukan dengan pengamatan terhadap proses pemberdayaan LPD. Peneliti memperoleh kesempatan mengamati proses pelatihan sertifikasi kompetensi ketua LPD pada rentang waktu 22 s.d. 26 Januari 2024.

Partisipan penelitian yang berkontribusi dalam penelitian ini meliputi ketua LP LPD, tenaga ahli LP LPD, Kepala (DPMA) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Kepala Bidang Ekonomi DPMA, Tim Pembina Umum LPD Provinsi Bali, dan tiga ketua LPD (transaksi kompleks, transaksi sedang, dan transaksi sederhana). Partisipan penelitian terbagi menjadi empat peran; 1) DPMA, Tim Pembina Umum LPD, LP LPD, dan LPD. Seluruh partisipan penelitian memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepedulian terhadap perkembangan LPD. Nama, instansi, dan peran dari masing-masing partisipan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Partisipan Penelitian

No	Nama Partisipan*	Peran	Pandangan
1	Tuan Jaya	Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Kebijakan umum pemberdayaan LPD
2	Tuan Raditya	Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Provinsi Bali	Kebijakan strategis pemberdayaan LPD
3	Prof Wayan	Tim Pembina Umum LPD Provinsi Bali	Praktik <i>Accounting Creative</i>
4	Tuan Nengah	Kepala LP LPD Provinsi Bali	Pengawasan dan Pemberdayaan LPD
5	Tuan Gusti	Tenaga Ahli LP LPD Provinsi Bali	Pengawasan dan Pemberdayaan LPD
6	Tuan Putu	Ketua LPD Desa Adat Padang Luwih	Ketua LPD dengan Karakteristik Transaksi Kompleks
7	Tuan Ngurah	Ketua LPD Desa Adat Sesandan	Ketua LPD dengan Karakteristik Transaksi Sedang
8	Tuan Gede	Ketua LPD Desa Adat Kutuh Kelod	Ketua LPD dengan Karakteristik Transaksi Sederhana

Sumber: Laporan Dana Padanan Tahun 2023 (diolah kembali 2024)

*Nama partisipan menggunakan nama samaran

Validitas dan Transferabilitas Data

Data utama penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dalam *natural setting*. Peneliti berpegangan teguh bahwa kedekatan dengan partisipan mampu menggali makna mendalam (Tavory, 2020). Penguatan kualitas data dilakukan dengan konfirmasi hasil wawancara melalui teknik triangulasi. Triangulasi data dilakukan melalui tiga kombinasi peningkatan kualitas data. Pertama, proses wawancara dalam durasi yang lama sampai menemukan data yang bersifat jenuh dalam artian tidak terdapat tambahan data baru (Richards and Hemphill, 2018). Wawancara ini dilakukan sepanjang pelaksanaan penelitian Dana Padanan Tahun 2023 pada aktivitas pendampingan transfer teknologi. Kedua, memperoleh pandangan dari berbagai sumber (Shea, 2022) terkait resistensi dan kesiapan transformasi digital layanan dan pelaporan LPD. Ketiga, melakukan konfirmasi pandangan partisipan dengan partisipan lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai ketentuan (Santos *et al.*, 2020) dalam suasana kekeluargaan di sela-sela kegiatan transfer teknologi.

Teknik Analisis

Data primer dan data sekunder yang sudah melewati validitas atau transferabilitas data dengan triangulasi data dianalisis dengan pendekatan interpretif. Teknik analisis interpretif pada penelitian ini dikembangkan dari panduan Cresswell bahwa interpreter memandang realitas sosial yang dinamis penuh dengan makna subjektif sebagai sintesis dari konstruksi sosial dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki *intentional human being* (Cresswell and Poth, 2018). Mengingat realitas sosial pada penelitian ini merupakan praktik *aggressive accounting creative* pada suatu LPD dengan kepemilikan *stakeholders* masyarakat adat dan tunduk dengan hukum adat setempat, analisis interpretif dikembangkan dengan *extending human local values* untuk memperoleh makna baru sesuai dengan konteksnya. Tahapan teknik analisis data yaitu: 1) pengumpulan data (wawancara mendalam dan observasi), dilengkapi dengan triangulasi data, 2) reduksi data yang membentuk tema-tema pandangan partisipan penelitian, 3) menghadirkan makna baru dengan asumsi *intentional human beings extending human local values*, 4) menyusun simpulan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Manuskrip Wawancara

Tuan Jaya, 22 Desember 2023

Saat ini digitalisasi sudah tidak bisa dibendung kami berharap LPD-LPD menggunakan aplikasi dalam operasional pelayanan. Ini sangat bermanfaat untuk transparansi pelaporan dan mencegah tindakan-tindakan di luar kewenangan pengurus atau pengelola ...

Tuan Raditya, 7 Desember 2023

Untuk memahami aplikasi yang digunakan di LPD kita harus pahami proses bisnisnya terlebih dahulu, dari proses bisnis itu akan terlihat bagian-bagian mana yang membutuhkan lapisan-lapisan pengaman digitalisasi sehingga harapannya praktik-praktik yang selama ini terjadi berupa *fraud* bisa terdeteksi dengan aplikasi yang dirancang ...

Prof Wayan, 30 Desember 2023

Kondisi idealnya harusnya ketika ada pengakuan pendapatan tiga bulan pertama menggunakan *accrual basis*, dan pada bulan keempat jika pengakuan bunga dari tiga bulan sebelumnya belum terealisasi maka dilakukan penyesuaian di bulan keempat. Namun hal seperti ini yang substansi tidak dilakukan oleh LPD ...

Tuan Nengah, 24 Januari 2024

Perputaran uang di LPD saat ini sudah tinggi, pada praktik-praktik penempatan dana deposito antar LPD juga sangat tinggi dan harus segera di terbitkan. Harapannya dengan aplikasi yang mengedepankan basis NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi alat yang bisa mencegah ketika penempatan-penempatan dana tidak sesuai dengan ketentuan. Dibutuhkan SDM yang handal mengingat sistem sebaik apapun yang mengoperasikan atau yang mengendalikan sistem dari belakang yang memegang peranan pengendalian ...

Tuan Gusti, 25 November 2023

Saya Bersama tim sudah melihat langsung bagaimana proses validasi data sebelum diinput ke dalam aplikasi. Tim yang memiliki latar belakang akuntansi dan sistem informasi melakukan penelusuran dokumen asal dalam bentuk *hard copy* terhadap catatan berbentuk excel setelah tervalidasi, selanjutnya diinput ke dalam aplikasi. Keunggulan aplikasi ini bisa meminimalisasi terjadinya selisih antara saldo awal yang tertuang dalam Laporan Posisi Keuangan dengan aplikasi ketika awal transformasi manual ke aplikasi ...

Tuan Putu, 18 Agustus 2023

Aplikasi sebelumnya itu fiturnya banyak, tapi tidak semua fitur digunakan dalam layanan LPD. Sebagai langkah awal cukup hanya membuat fitur-fitur yang keseharainnya digunakan seperti, fitur nasabah, update data nasabah, fitur deposito, fitur tabungan, fitur kredit, dan fitur produk-produk. Nanti sembari berjalan jika ada pengembangan baru ditambahkan fitur yang dibutuhkan ...

Tuan Ngurah, 9 Desember 2023

Kami sudah diberikan beberapa list fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi. Pada prinsipnya kami sudah mencoba dan sudah bisa menggunakan namun karena keterbatasan waktu kami mengalami kesulitan untuk mencoba semua fitur. Mungkin bisa dibantu membuat ringkasan dari fitur-fitur yang sering digunakan seperti fitur nasabah, tabungan, nasabah deposito, dan nasabah kredit. Cukup itu saja dulu agar mudah di pahami ...

Tuan Gede, 19 Desember 2023

Kami pada prinsipnya mengalami kendala dalam sumber daya manusia, ini kebetulan pegawai kami agak kurang menguasai teknologi dan ada kesibukan di adat. Saya sendiri memang memiliki latar belakang di sistem informasi namun tidak bisa secara keseluruhan mengelola dan melaporkan kegiatan LPD secara utuh. Sampai saat ini memang kami belum berencana menggunakan aplikasi jika seandainya menjadi suatu kewajiban dan memberi manfaat yang benar benar untuk masyarakat kami mempertimbangkan menggunakan aplikasi ...

Pembahasan Manuskrip Wawancara

Resistensi Transformasi Digital Layanan dan Pelaporan LPD

Penggalan pandangan yang intens dengan ketua LPD yang sudah menggunakan aplikasi (**Tuan Putu**), LPD yang sedang berproses menuju transformasi aplikasi (**Tuan Ngurah**), dan LPD yang mengalami resistensi penggunaan aplikasi (**Tuan Gede**). **Tuan Putu** menggambarkan bahwa LPD tersebut meskipun karakteristik transaksinya kompleks belum tentu memerlukan fitur sekompleks Lembaga keuangan lainnya. **Tuan Ngurah** berpandangan transformasi membutuhkan pemahaman yang komperensif dari segenap sumber daya manusia yang ada di LPD maupun dukungan dari pembina maupun pengawas LPD di desa adat setempat. Lebih lanjut **Tuan Ngurah** menyatakan fitur-fitur yang tersedia jumlahnya banyak diperlukan penyederhanaan fitur-fitur yang paling sering digunakan khususnya untuk peningkatan efisiensi layanan dan percepatan pelaporan. Kemudian pandangan dari **Tuan Gede**, ketua LPD yang resisten terhadap transformasi penggunaan aplikasi lebih melihat kendala sumber daya manusia dan belum adanya urgensi penggunaan aplikasi di LPD yang dengan karakter transaksi sederhana.

Pandangan ketiga informan yang mewakili LPD karakteristik kompleks, sedang, dan sederhana bisa dijelaskan dengan teori TAM. Hampir seluruh ketua LPD yang menjadi partisipan penelitian melihat bahwa kedua dimensi pembentuk teori TAM menjadi pertimbangan suatu LPD bertransformasi menuju digital. Pandangan ini sesuai dengan

penelitian bahwa pengguna aplikasi memiliki niat yang terbentuk dari dua persepsi kebermanfaatan dan kemudahan sesuai dengan urgensinya (Wirtz and Göttel, 2016; Granić, Nikola Marangunić and Andrina, 2019), sedangkan bagi LPD yang belum menggunakan aplikasi dan mengalami resistensi lebih melihat sudut pandang dimensi kebermanfaatan yang lebih awal karena belum pernah menggunakan aplikasi. Pemaknaan bahwa penggunaan aplikasi mampu menghadirkan efisiensi kecepatan dan peningkatan produktivitas (Somohano-Rodríguez, Madrid-Guijarro and López-Fernández, 2020) belum menjadi urgensi bagi **Tuan Gede**. Lebih lanjut diuraikan rasionalitas resistensi digital dan praktik *aggressive accounting creative*.

Aggressive Accounting Creative

Pandangan **Prof Wayan** membuka realitas praktik *aggressive accounting creative* yang menjadi kebiasaan pengelola LPD dengan mengabaikan pengakuan pendapatan sesuai ketentuan metode akrual dan kas *adjustment*. Secara ketentuan pengakuan pendapatan pada tiga bulan pertama menggunakan basis akrual dan pada bulan keempat dilakukan penyesuaian sesuai dengan realisasi kas yang diterima. *Aggressive accounting creative* terjadi melalui pengakuan pendapatan bunga hanya berbasis kas dari awal periode. Praktik *aggressive accounting creative* berlanjut pada pembentukan Cadangan Piutang Ragu-Ragu (CPRR).

Realitas resistensi pengakuan pendapatan bunga hanya berbasis kas dan pembentukan CPRR yang tidak sesuai dengan peraturan Gubernur Bali No 44 Tahun 2017 merupakan praktik yang mengutamakan *self-interest* pengelola LPD. CPRR menjadi pengurangan laba, sehingga bisa mengurangi besarnya pembagian laba bagi masyarakat desa adat, hal ini bisa dijelaskan dengan teori keagenan yaitu adanya permufakatan antara pengelola LPD dengan segenap *stakeholders* LPD di suatu desa adat demi kepentingan masyarakat setempat. Potensi benturan kepentingan ini mengacu pada perkembangan teori keagenan pada tipe empat (Darmayasa, 2024).

Transformasi Digital LPD suatu Langkah Anti-Aggressive Accounting Creative

Untuk mengembangkan suatu aplikasi yang mampu menutup celah-celah praktik *aggressive accounting creative* diperlukan pemahaman yang komprehensif terkait proses bisnis LPD, hal ini diungkapkan **Tuan Raditya**. Setelah pengembangan aplikasi dengan berbagai fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan dengan mudah perlu dipahami bahwa sumber daya manusia yang ada di belakang aplikasi memegang kendali penuh terhadap jalannya efektivitas dan efisiensi suatu aplikasi, hal ini menjadi perhatian **Tuan Nengah**.

Berbagai riset terkait tentang TAM memberikan bukti empiris dari sudut pandang dua persepsi sebelum menggunakan suatu aplikasi. Pertama terkait tentang kebermanfaatannya, yang kedua adalah kemudahan penggunaan (Granić, Nikola Marangunić and Andrina, 2019). Mengacu pada pandangan Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pembinaan LPD bahwa terlihat jelas kedua aspek persepsi pembentuk teori TAM bisa menjelaskan pentingnya transformasi digital pada LPD. Transformasi ini sebagai upaya resiliensi kekuatan pembangunan dari desa yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, sesuai dengan fungsi dan peran LPD untuk menopang perekonomian Bali (Nugraha and Suryanawa, 2021).

Tuan Nengah mengutarakan diperlukan suatu aplikasi yang mampu memproteksi *aggressive accounting creative* pada aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak menghambat layanan operasional LPD dan mampu mempercepat transparansi pelaporan LPD. **Tuan Gusti** menegaskan melalui validasi manual dengan bukti *hard copy* data dasar memberikan perlindungan terhadap praktik *aggressive accounting*. Penting kiranya memahami bagaimana perilaku pengelola LPD yang mendasari perilaku yang mengedepankan *self-interest* mengacu kepada teori keagenan tipe 4 (Darmayasa, 2019, 2024; Onjewu, Walton and Koliouis, 2023)

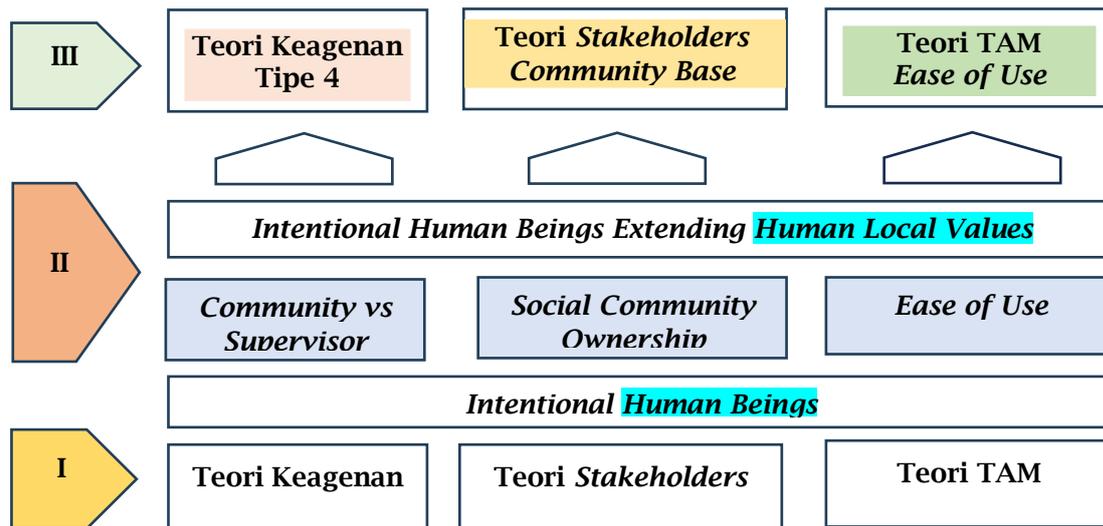
Teori *stakeholders* memberikan kita gambaran bahwa tanggungjawab LPD tidak terbatas kepada *stakeholders* desa setempat. Perlu kesadaran dan pemahaman bersama bahwa ekonomi Bali ditompang oleh 1.439 LPD yang tersebar di desa adat delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali. Bahwa operasional LPD yang merupakan lembaga keuangan

meskipun tidak berada di pengawasan OJK memiliki dampak yang masif ketika terjadi sesuatu kehilangan kepercayaan dari nasabah yang bisa menyebar dalam waktu cepat. Teori *stakeholders* bisa digunakan untuk memproteksi bahwa tanggung jawab pengelolaan LPD tidak terbatas kepada desa adat setempat. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menggunakan teori *stakeholders* (Mahajan *et al.*, 2023). Untuk membendung efek negatif informasi tersebut diperlukan pemahaman tanggungjawab pengelolaan suatu LPD di satu desa adat menjadi tanggungjawab krama Bali secara keseluruhan mengingat LPD adalah penopang ekonomi masyarakat di Bali secara inklusif dan berkelanjutan.

Extending Asumsi Teori: *Intentional Human Beings* Dengan *Human Local Values*

Percepatan tranformasi digital di LPD bisa digambarkan melalui pengembangan teori-teori baik itu teori TAM, teori *stakeholders*, dan teori keagenan. Uraian ini diawali dengan pengembangan model teori TAM pada LPD di Bali mengalami kendala dalam pemenuhan tingkat kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi khususnya bagi ketua LPD atau pegawai LPD yang belum memiliki kompetensi yang memadai tentang pengembangan teknologi dibutuhkan asumsi tambahan dalam perumusan kebijakan yang mengacu kepada teori TAM yang tidak sebatas kepada dua dimensi persepsi baik itu kebermanfaatan maupun kegunaan. Mencermati karakteristik LPD dengan keseharian masyarakatnya menjunjung tinggi nilai *Tri Hita Karana* (Bagiada and Darmayasa, 2015; Darmayasa, 2017; Sudarma and Darmayasa, 2018), diperlukan pengembangan asumsi berupa *Human Local Values* yang menitik beratkan kepada hubungan sesama yang mengedepankan kepekaan terhadap kemampuan pengguna.

Teori *stakeholders* memberikan kita pemahaman bahwa pengelolaan suatu entitas tidak terbatas pertanggung jawabannya kepada pemegang saham atau pemilik. Mengingat LPD memiliki kekhususan tanggungjawabnya tidak serta merta kepada masyarakat bahkan lebih besar lagi kepada wilayah dan negara perlu dipertimbangkan adanya kerangka berpikir pengembangan teori *stakeholders* yang dikembangkan dengan tambahan asumsi *Human Local Values*. Penambahan asumsi teori TAM, keagenan, dan *stakeholders* disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. *Extending Assumptions: Human Local Values on LPD*

SIMPULAN

Menjawab tujuan penelitian, menggunakan pendekatan interpretif diperoleh makna terkait realitas praktik *aggressive accounting creative* untuk mempertahankan tingkat kesehatan dan risiko LPD yang dapat diterima oleh masyarakat. Praktik *aggressive accounting creative* melalui pengakuan pendapatan bunga hanya secara kas dan menyesuaikan pembentukan CPRR yang tidak menggerus laba LPD. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang bisa dijelaskan dengan

teori keagenaan tipe 4 (permufakatan masyarakat dan pengelola LPD yang berbenturan dengan pemberdayaan LPD).

Melalui teori *stakeholders* dan teori TAM dengan penambahan asumsi *intentional human beings extending human local values* diperoleh pemaknaan baru terkait *anti-aggressive accounting creative*. Pemaknaan baru ini mengantarkan pada urgensi percepatan transformasi digital melalui fitur pengakuan pendapatan bunga dengan akrual basis dan kas *adjustment* sehingga secara otomatis menghitung alokasi CPRR yang sesuai setiap periode. Transformasi *anti-aggressive accounting creative* meningkatkan kualitas pelaporan LPD, menguatkan tata kelola LPD, serta mendorong percepatan pembangunan inklusif yang berkelanjutan dari desa, menuju wilayah, dan bermuara pada tingkat nasional.

KETERBATASAN DAN SARAN

Mengingat partisipan penelitian terlibat dikategorikan menjadi empat peran yang terdiri dari pembina, pemberdayaan, akademisi, dan ketua LPD, maka pandangan yang dihasilkan belum membumi pada praktik *aggressive accounting creative* pada suatu karakteristik transaksi LPD tertentu.

Kedepannya, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan studi kasus pada LPD dengan karakteristik transaksi tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian melalui wawancara mendalam dan pengamatan yang komprehensif terhadap segenap pengelola, pengawas, dan tokoh masyarakat adat setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abed, I.A., Hussin, N., Ali, M.A., *et al.* (2022) 'Creative Accounting Determinants and Financial Reporting Quality: Systematic Literature Review', *Risks*, 10(4), pp. 1-25. Available at: <https://doi.org/10.3390/risks10040076>.
- Abed, I.A., Hussin, N., Haddad, H., *et al.* (2022) 'Creative Accounting Determination and Financial Reporting Quality: The Integration of Transparency and Disclosure', *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(1), p. 38. Available at: <https://doi.org/10.3390/joitmc8010038>.
- Adámiková, E. and Čorejová, T. (2021) 'Creative Accounting and the Possibility of Its Detection in the Evaluation of the Company by Expert', *Journal of Risk and Financial Management*, 14(7). Available at: <https://doi.org/10.3390/jrfm14070327>.
- Ali, C. Ben (2020) 'Agency Theory and Fraud', *Corporate Fraud Exposed*, 12(1976), pp. 149-167. Available at: <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-417-120201009>.
- Alkausar, B. *et al.* (2023) 'Corporate tax aggressiveness: evidence unresolved agency problem captured by theory agency type 3', *Cogent Business and Management*, 10(2). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>.
- Anderson, K.T. and Holloway, J. (2020) 'Discourse analysis as theory, method, and epistemology in studies of education policy', *Journal of Education Policy*, 35(2), pp. 188-221. Available at: <https://doi.org/10.1080/02680939.2018.1552992>.
- Andersson, M., Juliá, J.P. and Palacio Chaverra, A.F. (2024) 'Resilience to economic shrinking: reinterpreting the Asian economic miracle in a comparative perspective, 1964-2018', *Development Studies Research*, 11(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2309207>.
- Bagiada, I.M. and Darmayasa, I.N. (2015) 'Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)', in *Symposium Nasional Akuntansi Vokasi IV*. Manado: Politeknik Negeri Manado, 28-30 Mei 2015, pp. 798-815.
- Cresswell, J.W. and Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing*

Among Five Approaches (4th ed.). Sage Publications Inc. USA. Available at: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>.

- Darmayasa, I.N. (2017) 'Yadnya Sebagai Pemaknaan Lain Atas Nilai Wajar Harta Amnesti Pajak', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), pp. 166-182. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7046>.
- Darmayasa, I.N. (2019) 'Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (45), pp. 22-41. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>.
- Darmayasa, I.N. (2023) 'Realitas Audit Umum Dan Investigasi Pada Lembaga Perkreditan Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), pp. 98-114. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.07>.
- Darmayasa, I.N. (2024) 'Understanding Digital Transformation Village Credit Institutions Towards Sustainability Based on Local Genius', *1. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), pp. 1-11.
- Darmayasa, I.N., Parnata, I.K. and Setyastrini, N.L.P. (2023) 'Implementasi ISAK 35 pada Lembaga Perkreditan Desa', *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 14(2), pp. 143-160. Available at: <https://doi.org/10.18860/em.v14i2.20514>.
- Davis, P.E. *et al.* (2021) 'Agency theory utility and social entrepreneurship: issues of identity and role conflict', *Review of Managerial Science*, 15(8), pp. 2299-2318. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11846-020-00423-y>.
- Dewi, N.K.U.K. (2021) 'Internalisasi Tri Hita Karana Dalam Usaha Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali Indonesia', *Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4), pp. 1-18. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70390>.
- Gioia, D. (2021) 'A Systematic Methodology for Doing Qualitative Research', *Journal of Applied Behavioral Science*, 57(1), pp. 20-29. Available at: <https://doi.org/10.1177/0021886320982715>.
- Granić, A., Nikola Marangunić and Andrina (2019) 'Q1_Granić (2019) Technology acceptance model in educational context_A systematic literature review.pdf', *British Journal of Educational Technology*, 50(5), pp. 2572-2593. Available at: <https://doi.org/doi:10.1111/bjet.12864>.
- Gupta, C.M. and Kumar, D. (2020) 'Creative accounting a tool for financial crime: a review of the techniques and its effects', *Journal of Financial Crime*, 27(2), pp. 397-411. Available at: <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2019-0075>.
- Lin, B.C. (2022) 'MMT or Public Enterprises A Contribution to Economic Sustainability', *Journal of Economic Issues*, 56(2), pp. 455-462. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00213624.2022.2061792>.
- Mahajan, R. *et al.* (2023) 'Stakeholder theory', *Journal of Business Research*, 166(December 2022), p. 114104. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114104>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2019) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications Inc. USA. Available at: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>.
- Nugraha, K.M.P.N. and Suryanawa, I.K. (2021) 'The Effect of Implementing Good Corporate Governance Principles, Tri Hita Karana Culture and Organizational Commitments on LPD Financial Performance', *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), pp. 555-563. Available at: www.ajhssr.com.

- Onjewu, A.K.E., Walton, N. and Koliouisis, I. (2023) 'Blockchain agency theory', *Technological Forecasting and Social Change*, 191(April 2022), p. 122482. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122482>.
- Putri, N.W.A. and Suartana, I.W. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kabupaten Badung: Peran Keefektifan Pengendalian Internal', *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), pp. 1-16. Available at: <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p01>.
- Riana, I.G. (2021) 'Influence of Spiritual Leadership', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), pp. 1111-1124. Available at: <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1111>.
- Richards, K.A.R. and Hemphill, M.A. (2018) 'A Practical Guide to Collaborative Qualitative Data Analysis', *Journal of Teaching in Physical Education*, 37(2), pp. 225-231. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1123/jtpe.2017-0084>.
- Santos, K. da S. *et al.* (2020) 'The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study', *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(2), pp. 655-664. Available at: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>.
- Sarmawa, I.W.G. *et al.* (2020) 'Ethical entrepreneurial leadership and organizational trust for organizational sustainability', *Cogent Business and Management*, 7(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1818368>.
- Shea, T. (2022) 'The potential for qualitative triangulation to mitigate investigative negligence', *Police Practice and Research*, 23(2), pp. 195-211. Available at: <https://doi.org/10.1080/15614263.2021.1915786>.
- Solihin, A. *et al.* (2021) 'Do government policies drive economic growth convergence? Evidence from East Java, Indonesia', *Cogent Economics and Finance*, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1992875>.
- Somohano-Rodríguez, F.M., Madrid-Guijarro, A. and López-Fernández, J.M. (2020) 'Does Industry 4.0 really matter for SME innovation?', *Journal of Small Business Management*, 60(4), pp. 1-28. Available at: <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1780728>.
- Sudarma, I.M. and Darmayasa, I.N. (2018) 'The Philosophy Of Tat Twam Asi: The Foundation Of Consciousness Regarding Post-Tax Amnesty (Cases In Indonesia)', *Journal of Business and Finance in Emerging Markets*, 2(1), pp. 153-160. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32770/jbfem.vol1153-160>.
- Suputra, M.A.A. (2021) 'Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh', *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), pp. 310-324. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2021>.
- Tavory, I. (2020) 'Interviews and Inference: Making Sense of Interview Data in Qualitative Research', *Qualitative Sociology*, 43(4), pp. 449-465. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11133-020-09464-x>.
- Vega Falcón, V. *et al.* (2021) 'Creative accounting: Legal and business perspectives from information processes', *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(Special Issue 5), pp. 737-754. Available at: <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.47>.
- Wirtz, B.W. and Göttel, V. (2016) 'Technology acceptance in social media: Review, synthesis and directions for future empirical research', *Journal of Electronic Commerce Research*, 17(2), pp. 97-115. Available at: http://www.jecr.org/sites/default/files/17_2Paper1.pdf.